



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



(0264) 201019



bkpsdmpwk@gmail.com



bkpsdm.purwakartakab.go.id

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jln Veteran Komplek Griya Hegarmanah Ciseureuh Purwakarta (41118)
Telepon (0264) 201019, Faksimili. (0264) 201019, email : bkdpwk@gmail.com
Website : bkpsdm.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : KU.02/kep.168 – BKPSDM/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. Dalam rangka pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan Musrembang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2006 nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2008 nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 95);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 101);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Purwakarta
pada tanggal : 31 Juli 2023



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA

H. WAHYU WIBISONO
NIP. 19670829 199503 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA
KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023**

- I Penanggung Jawab : Kepala BKPSDM
- II Ketua : Sekretaris BKPSDM
- III Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengadaan
Kepala Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Kepala Bidang Pembinaan dan
Kesejahteraan
- IV Sekretaris : Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan
dan Pelaporan
- V Anggota : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
Analisis Kepegawaian Ahli Muda (1 orang)
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli
Muda (6) Orang


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA

H. WAHYU WIBISONO
NIP. 19670829 199503 1 001



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyelarasan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2022 Nomor 48);

42. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 54);

43. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2023 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

Pasal 4

- (1) Sistematisa penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
 - c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV PENUTUP
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Perubahan Renja PD Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

- 1. Dinas Pendidikan
- 2. Dinas Kesehatan
- 3. Rumah Sakit Bayu Asih
- 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja
- 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- 11. Dinas Pangan dan Pertanian
- 12. Dinas Lingkungan Hidup
- 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 16. Dinas Perhubungan
- 17. Dinas Komunikasi dan Informatika
- 18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
- 19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Perikanan dan Peternakan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari
32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Agustus 2023


BUPATI PURWAKARTA,
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 14 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 101

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 telah selesai disusun. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berusaha melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini dijadikan acuan dalam penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang dan kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini.

Purwakarta, Agustus 2023



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA

H. WAHYU WIBISONO

NIP. 196708291995031001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2023	7
2.1 Evaluasi Kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Triwulan II tahun 2023.....	7
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Purwakarta	17
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM	19
IV. PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2022	8
Tabel 2.2 Realisasi Keuangan BKPSDM Kabupaten Purwakarta Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023	9
Tabel 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	13
Tabel 3.1 Matriks Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang di persyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD pada khususnya, dan pembangunan daerah umumnya. Perubahan Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Perubahan Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit PD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD bahkan RPJPD. Perubahan Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Perubahan Renja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk mewujudkan kinerja aparatur profesional dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang tepat, mudah, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi dalam lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta diperlukan perencanaan yang benar-benar tepat guna dan terarah.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini dijadikan acuan penyusunan rancangan APBD Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dan sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 95);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai pedoman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yaitu :

- a. Sebagai penjabaran dari Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
- b. Sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
- d. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten purwakarta berdasarkan capaian target kinerja program yang telah ditetapkan;

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Purwakarta mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sistematika penyusunan Perubahan Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Kinerja BKPSDM Triwulan II Tahun 2023
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
- 2.3 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM KABUPATEN PURWAKARTA

BAB. IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta memiliki 3 (tiga) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan dengan Sumber Dana dari APBD Kabupaten purwakarta. Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023 mengacu pada tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 meliputi:

Program Teknis Urusan Kepegawaian

1. Program Kepegawaian Daerah, dioperasikan ke dalam 4 (empat) Kegiatan dan terdiri dari 13 (enam belas) Sub Kegiatan.

Program Teknis Urusan Pendidikan dan pelatihan

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dioperasionalkan ke dalam 2 (dua) Kegiatan dan terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan.

Selain program tersebut di atas, pelaksanaan kinerja juga di tunjang oleh program pendukung kesekretariatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dioperasionalkan ke dalam 8 (delapan) Kegiatan dan terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Sub kegiatan.

Evaluasi capaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Capaian Kinerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Penerapan Sistem Merit	Sistem Merit	KATEGORI III (250-324)	KATEGORI II (241,5)	96,60%
2.	Mengelola dan mengembangkan Manajemen BKPSDM dengan menggunakan teknologi informasi	Persentase pemberian penghargaan ASN berprestasi/ berinovasi/ teladan/ dedikasi dan ASN Purna Bhakti / Pensiun	5,4	12,6	233
		Jumlah Sistem Manajemen Kepegawaian Berbasis teknologi informasi yang sudah di aplikasikan dengan baik	4	4	100
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang terintegrasi	Jumlah sistem pelayanan di bidang kepegawaian yang dapat diapilkasikan dengan baik	3	3	100

Sumber : Lakip BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Anggaran yang tersedia untuk mendukung pencapaian kegiatan/program/sasaran strategi akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 38.567.303.366,- dengan realisasi keuangan sampai triwulan II sebesar Rp. 11.203.007.825,- dengan rincian Anggaran dan Realisasi persubkegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Realisasi Keuangan BKPSDM Kabupaten Purwakarta
sampai dengan Triwulan II tahun 2023

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.413.579.166	8.026.404.640	27,29
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.996.400	18.279.800	12,78
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.335.700	1.925.900	3,68
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.725.700	5.831.700	42,49
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.284.000	0	0,00
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.404.000	8.736.000	60,65
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.247.000	1.786.200	3,55
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.105.735.784	6.962.406.312	27,73
6.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.081.117.084	6.955.021.612	27,73
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.694.300	1.750.300	12,78
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.924.400	5.634.400	51,58

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.517.900	19.147.900	78,10
9.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	24.517.900	19.147.900	78,10
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.377.200	3.900.000	3,81
10.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	11.324.300	0	0,00
11.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	3.900.000	7,80
12.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41.052.900	0	0,00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.360.233.744	368.979.110	27,13
13.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.751.400	0	0,00
14.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.310.050	0	0,00
15.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.560.900	36.148.250	98,87
16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.000.000	68.702.000	30,53
17.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.003.000	82.422.000	77,75
18.	Penyediaan Bahan/Material	159.697.094	79.844.500	50,00
19.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	126.000.000	10.000.000	7,94
20.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.311.000	91.862.360	36,12
21.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	98.600.300	0	0,00
22.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	0	0,00
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	526.907.200	0	0,00
23.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	328.246.000	0	0,00
24.	Pengadaan Mebel	198.661.200	0	0,00

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.738.354.938	651.569.818	37,48
25.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.990.000	2.500.000	27,81
26.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	468.224.450	95.440.851	20,38
27.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.261.140.488	553.628.967	43,90
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.456.000	2.121.700	0,51
28.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	132.000.000	2.121.700	1,61
29.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.900.000	0	0,00
30.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.696.000	0	0,00
31.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.860.000	0	0,00
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.051.035.900	2.145.686.085	42,48
2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.533.788.300	522.643.835	34,08
32.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.078.800.000	291.105.135	26,98
33.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	254.988.300	225.049.100	88,26
34.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	200.000.000	6.489.600	3,24
2.2	Mutasi dan Promosi ASN	1.890.005.000	1.061.602.900	56,17
35.	Pengelolaan Mutasi ASN	100.000.000	8.850.100	8,85
36.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	159.992.000	10.907.000	6,82
37.	Pengelolaan Promosi ASN	1.630.013.000	1.041.845.800	63,92
2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	937.242.900	182.740.100	19,50
38.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	389.993.500	169.872.700	43,56

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5
39.	Pengelolaan Assessment Center	250.010.000	0	0,00
40.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	247.584.200	0	0,00
41.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	49.655.200	12.867.400	25,91
2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	689.999.700	378.699.250	54,88
42.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	260.000.000	151.979.300	58,45
43.	Pembinaan Disiplin ASN	329.999.700	196.755.450	59,62
44.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100.000.000	29.964.500	29,96
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.102.688.300	1.030.917.100	25,13
3.1	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.282.598.300	179.475.000	13,99
45.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.282.598.300	179.475.000	13,99
3.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.820.090.000	851.442.100	30,19
46.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2.820.090.000	851.442.100	30,19
Jumlah		38.567.303.366	11.203.007.825	29,05

Sumber : Subbagian PKP BKPSDM Kabupaten Purwakarta

Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar 29,05%. Kecilnya penyerapan anggaran sampai triwulan II dikarenakan adanya refocusing anggaran.

Lebih lanjut pencapaian kinerja Renja dapat dilihat pada tabel Evaluasi Kinerja Per Triwulan II (terlampir).

Tabel 2.3
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

Kode	Bidanf Urusan Pemerintahan dan Program Perioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (2023) Tahun yang dievaluasi (Parsial 1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2023) Tahun yang dievalausi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Catatan/ Permasalahan
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03.5.04.0.00.01.00	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				38.567.303.366		11.203.007.825	49,37	29,05	
5.03	Kepegawaian				34.464.615.066		10.172.090.725	53,02	29,51	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				29.413.579.166		8.026.404.640		27,29	
		1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	A		A		100,00		
		2. Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan	%	90,00		27,29		30,32		

		Perkantoran								
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah				5.051.035.900		2.145.686.085		42,48	
		1. Persentase Penurunan Indisipliner Pegawai	Persen	3,33		0,00		0,00		
		2. Persentase Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian yang Disosialisasikan	Persen	100,00		100,00		100,00		
		3. Persentase Sistem Aplikasi Kinerja	Persen	100,00		0,00		0,00		
		4. Persentase ASN Berprestasi/ Berinovasi/ Teladan dan Berdesikasi yang Mendapat Penghargaan	Persen	1,28		1,43		111,72		
		5. Persentase ASN Purna Bhakti/ Pensiun yang Mendapat Penghargaan dan Tepat Waktu	Persen	4,23		2,33		55,08		
		6. Persentase Pengadaan ASN sesuai Kebutuhan Formasi Pegawai	Persen	0,35		0,11		31,43		
		7. Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrastor, dan Jabatan	Persen	100,00		97,25		97,25		

		Pengawas								
		8. Persentase Penataan ASN sesuai dengan Kompetensi	Persen	100,00		13,50		13,50		
		9. Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu	Persen	100,00		84,54		84,54		
		10. Persentase Data ASN yang Mutakhir	Persen	100,00		65,44		65,44		
		11. Persentase Integrasi Aplikasi Kepegawaian	Persen	100,00		0,00		0,00		
5.04	Pendidikan dan Pelatihan				4.102.688.300		1.030.917.100	33,55	25,13	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				4.102.688.300		1.030.917.100		25,13	
		1. Persentase Calon ASN yang telah mengikuti Pelatihan Dasar	Persen	100,00		0,00		0,00		
		2. Persentase ASN yang Diklat Fungsional/ Teknis/Bimtek/Seminar/ Lokakarya dan Tugas Belajar	Persen	1,53		1,54		100,65		

		3. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	12,15		0,00		0,00		
--	--	--	--------	-------	--	------	--	------	--	--



2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Purwakarta

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia, melalui perubahan mendasar dalam manajemen ASN, yakni penerapan sistem merit sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN). Peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. ASN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kunci efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi, sangat tergantung pada kompetensi, kualitas dan kinerja para Aparatur Sipil Negara. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN sebagaimana amanat UU-ASN telah menjadi kebutuhan dasar bagi pemerintah untuk menopang tata kelola pemerintahan agar berjalan secara efektif.

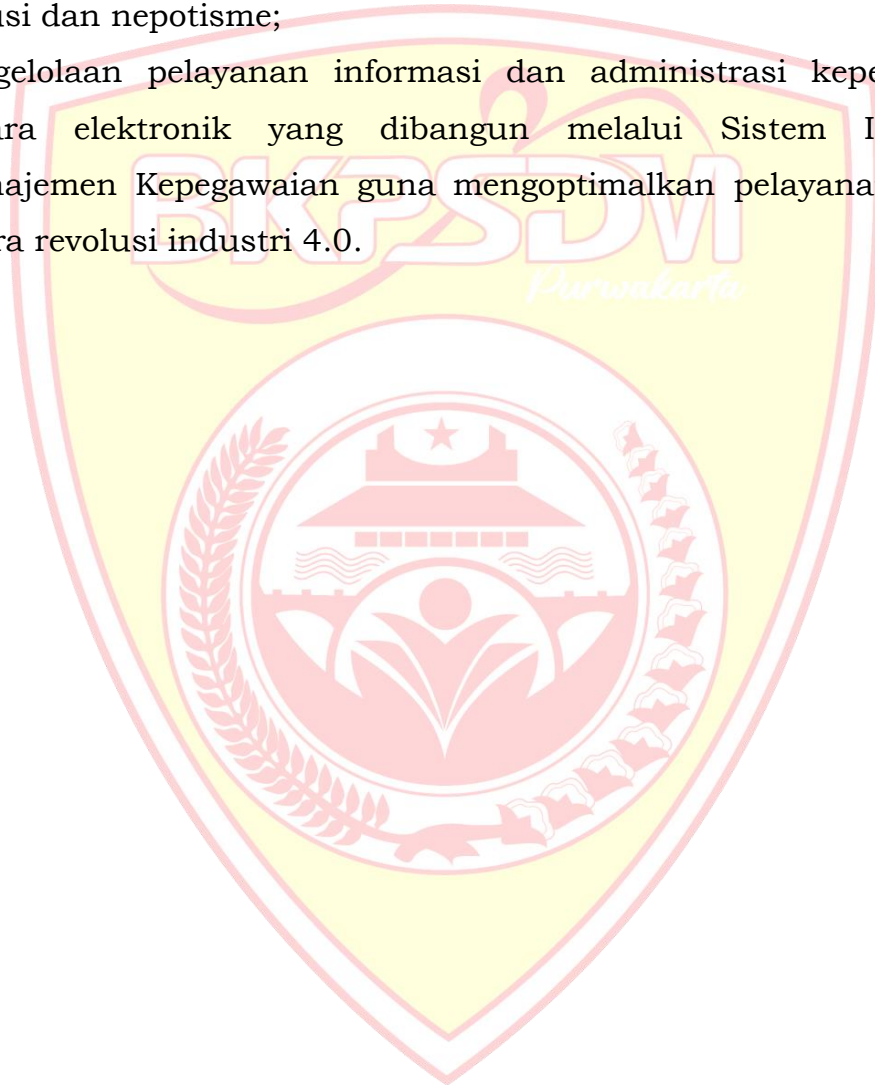
Isu-isu pelayanan kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa peraturan tersebut mengatur manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil mulai dari proses pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai.

Dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 pembangunan bidang pemerintahan Aspek Aparatur diarahkan pada pemantapan profesionalitas aparatur dalam pelayanan publik yang didukung oleh sistem dan standar pelayanan yang teruji. Fokus perhatian yang menjadi isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Penataan Manajemen Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan menerapkan sistem merit sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara

adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan atau kondisi kecacatan maka dapat mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Pengelolaan pelayanan informasi dan administrasi kepegawaian secara elektronik yang dibangun melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian guna mengoptimalkan pelayanan publik di era revolusi industri 4.0.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan startegi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka Langkah operasional yang harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategi yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Selanjutnya rician program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Purwakarta lebih lengkap dapat di lihat pada Tabel Matriks Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dibawah ini :

Tabel 3.1
MATRIKS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan		
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	Perangkat Daerah	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
5.3	KEPEGAWAIAN										34.884.615.066									83.948.532.680		
5.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										29.413.579.166									79.401.896.780		
5.3.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										142.996.400									142.996.400		
5.3.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Penyelenggaraan an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	52.335.700	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	52.335.700	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	13.725.700	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	13.725.700	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	12.284.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	12.284.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	14.404.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	14.404.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah	
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
5.3.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	50.247.00	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	50.247.00	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										25.105.735.784									75.739.550.598		
5.3.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	Jumlah Laporan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah	15 Laporan	25.081.117.084	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	Jumlah Laporan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah	15 Laporan	75.714.931.898	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.1.2.02.3	Pelaksanaan dan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah	15 Laporan	0	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan yang disusun	12 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah	15 Laporan	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah	15 Laporan	13.694.300	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah	15 Laporan	13.694.300	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah	15 Laporan	10.924.400	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Meningkatnya kualitas dokumen laporan keuangan yang disusun	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah	15 Laporan	10.924.400	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan		
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	Perangkat Daerah	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
5.3.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										24.517.900									24.517.900		
5.3.1.2.03. 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Barang milik Daerah pada BKPSDM	1 Dokumen	24.517.900	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Barang milik Daerah pada BKPSDM	1 Dokumen	24.517.900	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										102.377.200									168.457.200		
5.3.1.2.05. 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann ya	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	-	-	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Stel	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	66.080.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.1.2.05. 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	11.324.300	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	11.324.300	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.1.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Kegiatan Pedidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Paket	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	50.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Kegiatan Pedidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70 Orang	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	50.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.1.2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	30 Orang	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	41.052.900	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	30 Orang	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	41.052.900	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1.360.233.744									1.175.563.744		
5.3.1.2.06. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	56.751.400	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	56.751.400	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	Perangkat Daerah
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.1.2.06. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	197.310.050	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	252.310.050	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.06. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	36.560.900	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	36.560.900	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.06. 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	225.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Kantor yang Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	162.920.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.06. 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	106.003.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	106.003.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.06. 7	Penyediaan Bahan/Materi al	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	159.697.094	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	159.697.094	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.06. 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	126.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	67.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.1.2.06. 9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	254.311.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	254.311.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.06. 10	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	98.600.300	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	80.010.300	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	100.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Laporan Administrasi Umum	21 Laporan	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										526.907.200									0	
5.3.1.2.07. 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Disediakan	15 Unit	328.246.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Disediakan	15 Unit	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.07. 5	Pengadaan Mebel	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 unit	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Disediakan	15 Unit	198.661.200	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 unit	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Disediakan	15 Unit	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.738.354.938									1.738.354.938	
5.3.1.2.08. 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Laporan	8.990.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Laporan	8.990.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	Jumlah Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Laporan	468.224.450	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	Jumlah Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Laporan	468.224.450	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Laporan	1.261.140.488	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Laporan	1.261.140.488	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										412.456.000									412.456.000	
5.3.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	Jumlah Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngan Urusan Pemerintahan Daerah	149 Unit	132.000.000	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	Jumlah Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngan Urusan Pemerintahan Daerah	149 Unit	132.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 unit	Jumlah Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngan Urusan Pemerintahan Daerah	149 Unit	59.900.000	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 unit	Jumlah Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngan Urusan Pemerintahan Daerah	149 Unit	59.900.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.1.2.09.9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	Jumlah Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngan Urusan Pemerintahan Daerah	149 Unit	194.696.000	Kab. Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	Jumlah Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunngan Urusan Pemerintahan Daerah	149 Unit	194.696.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan		Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
5.3.1.2.09. 10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	35 unit	Jumlah Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	149 Unit	25.860.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Capaian SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A; 90 Opini; Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	35 unit	Jumlah Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunangan Urusan Pemerintahan Daerah	149 Unit	25.860.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH										5.471.035.9000									4.546.635.900		
5.3.2.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN										1.553.788.300									1.207.388.300		
5.3.2.2.01. 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 100 persen	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	6 Dokumen	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 100 persen	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentia n ASN	6 Dokumen	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan		Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
5.3.2.2.01. 3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Peningkatan Penyelenggaraan an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Cisureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinais dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	6 Dokumen	1.078.800.000	Kab. Purwakarta, Cisureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinais dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	6 Dokumen	752.400.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.2.2.01. 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Peningkatan Penyelenggaraan an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Cisureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	6 Dokumen	274.983.300	Kab. Purwakarta, Cisureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	6 Dokumen	254.988.300	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	
				Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	Perangkat Daerah
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.2.2.01.8	Facilitasi Lembaga Profesi ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	6 Dokumen	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100	Jumlah ension profesi ASN yang dipasilitasi	1 lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	6 Dokumen	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	6 Dokumen	200.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	6 Dokumen	200.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah	
				Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
5.3.2.2.01. 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	6 Dokumen	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentia n ASN	6 Dokumen	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.2.2.01. 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian ASN	6 Dokumen	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentia n ASN	6 Dokumen	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.2.2.02	Mutasi dan Promosi ASN										1.930.005.000									1.890.005.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah	
				Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)			Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
5.3.2.2.02.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Peningkatan Penyelenggaraan an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN	5 Dokumen	100.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN	5 Dokumen	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.2.2.02.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Peningkatan Penyelenggaraan an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN	5 Dokumen	199.992.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN	5 Dokumen	159.992.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan		Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
5.3.2.2.02.3	Pengelolaan Promosi ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN	5 Dokumen	1.630.013.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Mutasi dan Promosi ASN	5 Dokumen	1.630.013.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.3.2.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN										937.242.900									759.242.900		
5.3.2.2.03.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kompetensi ASN	2 Dokumen	389.993.500	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	150 orang	Jumlah Dokumen Hasil ension nga PKompetensi ASN	2 Dokumen	389.993.500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.2.2.03.2	Pengelolaan Assessment Center	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kompotensi ASN	2 Dokumen	250.010.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil ension nga PKompotensi ASN	2 Dokumen	250.010.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.03.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kompotensi ASN	2 Dokumen	247.584.200	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	50 Orang	Jumlah Dokumen Hasil ension nga PKompotensi ASN	2 Dokumen	69.584.200	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur		Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.2.2.03. 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kompetensi ASN	2 Dokumen	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil ension nga PKompetensi ASN	2 Dokumen	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.03. 14	Fasilitasi Pengembang an Karir dalam Jabatan Fungsional	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	3 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kompetensi ASN	2 Dokumen	49.655.200	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	3 Orang	Jumlah Dokumen Hasil ension nga PKompetensi ASN	2 Dokumen	49.655.200	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										1.049.999.700									689.999.700	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan		Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional		
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
5.3.2.2.04. 3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	Jumlah ASN yg mendapat Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	349 orang	400.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN 4,23; berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah Dokumen 1 Laporan	Jumlah ASN yg mendapat Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	349 orang	260.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM		
5.3.2.2.04. 4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	Jumlah ASN yg mendapat Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	349 orang	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN 4,23; berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	Jumlah ASN yg mendapat Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	349 orang	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.3.2.2.04.5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 Orang	Jumlah ASN yg mendapat Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	349 orang	0	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 Orang	Jumlah ASN yg mendapat Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	349 orang	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
5.3.2.2.04.7	Pembinaan Disiplin ASN	Peningkatan Penyelenggaraan Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	695 Orang	Jumlah ASN yg mendapat Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	349 orang	549.999.700	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Cisureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	695 Orang	Jumlah ASN yg mendapat Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	349 orang	329.999.700	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan		
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	Perangkat Daerah	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
5.3.2.2.04. 8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	29 Orang	Jumlah ASN yg mendapat Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	349 orang	100.000.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN berprestasi/berinovasi/tel adan dan berdedikasi yang mendapat penghargaan; Persentase ASN Purna bhakti/ ension yang mendapat penghargaan dan tepat waktu; Persentase Data ASN Yang Mutakhir; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja; Persentase Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Yang Tepat Waktu; Persentase Penataan ASN Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pengadaan ASN sesuai kebutuhan formasi pegawai; Persentase Pengisian Pemangku Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas; Persentase Penurunan Indisipliner pegawai; Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian yang disosialisasikan; Persentase Sistem Aplikasi Kinerja.	4,23; 4,23; 100; 100; 0,35; 100; 0,35; 100; 3,33; 100; 100 persen	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	29 Orang	Jumlah ASN yg mendapat Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	349 orang	100.000.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										4.102.688.300									4.102.688.300		
5.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										4.102.688.300									4.102.688.300		
5.4.2.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis										1.282.598.300									1.282.598.300		
5.4.2.2.01. 3	Penyelenggara an Pengembang an Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN yang diklat fungsional/ teknis/ bimtek/ seminar / lokakarya dan Tugas Belajar; Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; Persentase Calon ASN yang telah mengikuti Pelatihan Dasar	1,53; 12,5; 100; Persen	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	Jumlah ASN yang mendapat Pengembangan Kompetensi Teknis	120 Orang	1.282.598.300	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN yang diklat fungsional/ teknis/ bimtek/ seminar / lokakarya dan Tugas Belajar; Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; Persentase Calon ASN yang telah mengikuti Pelatihan Dasar	1,53; 12,5; 100; Persen	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	Jumlah ASN yang mendapat Pengembang an Kompetensi Teknis	120 Orang	1.282.598.300	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM	
5.4.2.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional										2.820.090.000									2.820.090.000		

Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	SEBELUM PERUBAHAN								SETELAH PERUBAHAN								Keterangan	Perangkat Daerah
				Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5.4.2.2.02. 7	Penyelenggara an Pengembang an Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpina n, dan Prajabatan	Peningkatan Penyelenggara an Good Governance yang Berbasis IPTEK	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN yang diklat fungsional/ teknis/ bimtek/ seminar / lokakarya dan Tugas Belajar; Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; Persentase Calon ASN yang telah mengikuti Pelatihan Dasar	1,53; 12,5; 100; Persen	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2 Laporan	2.820.090.000	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Persentase ASN yang diklat fungsional/ teknis/ bimtek/ seminar / lokakarya dan Tugas Belajar; Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; Persentase Calon ASN yang telah mengikuti Pelatihan Dasar	1,53; 12,5; 100; Persen	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembang an Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2 Laporan	2.820.090.000	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	BKPSDM
											38.987.303.366								88.051.220.980		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini merupakan Perubahan Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Adapun kaidah pelaksanaan kegiatan BKPSDM Kabupaten Purwakarta didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara, UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, Peraturan Presiden No. 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar dan Permendagri 85 tahun 2017 tentang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel.

Purwakarta, Agustus 2023



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA

H. WAHYU WIBISONO
NIP. 196708291995031001